BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2020

Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka mengontrol kebijakan yang diambil oleh badan publik demi terwujudkanya tata kelola pemerintahan baik.

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan).

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, Badan Publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga secara langsung berdampak pada pelaksanaan layanan publik dengan kualitas yang baik.

Di bidang pengawasan Obat dan Makanan, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik menciptakan tranparansi pelaksanaan kebijakan dan program oleh instansi pemerintah sehingga mendorong *good and clean gorvernance* (kepemerintahan yang baik dan bersih). Keterbukaan informasi publik juga memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan Badan POM sehingga mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan Aman. Kemudahan akses informasi publik oleh masyarakat menciptakan masyarakat yang cerdas dan aktif berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Badan POM sebagai Badan Publik telah berkomitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui pembentukan PPID Badan POM di tahun 2011. Badan POM terus mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan strategi inovasi dan kolaborasi serta dukungan kebijakan, sistem, SDM, sarana-prasarana dan anggaran.

Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik yaitu secara rutin berpartisipasi dalam Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2020, Badan POM berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik "INFORMATIF" dengan nilai 94,09 meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,99.

Laporan Tahunan PPID Badan POM Tahun 2020 ini memberikan informasi terkait upaya-upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik selama tahun 2020. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Badan POM.

Jakarta, 17 Februari 2021
Koordinator PPID Badan POM

Reghi Perdana, SH., LLM

Ringkasan Eksekutif

Badan POM sebagai badan publik senantiasa berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan obat dan makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan, yaitu pengawasan pemerintah, produsen, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi Badan POM dalam peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan untuk perlindungan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan bangsa.

Sejak 2011, Badan POM telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011, sebagai salah satu garda terdepan di lingkungan Badan POM dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan obat dan makanan. Selama tahun 2020, PPID Badan POM telah menerima 16 permohonan informasi publik dengan rata-rata waktu layanan 8,25 Hari Kerja. Terdapat 8 (50,00%) permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, 3 (18,75%) permohonan informasi dikabulkan sebagian, dan 5 (31,25%) permohonan informasi ditolak. Adapun alasan permohonan informasi ditolak/ dikabulkan sebagian yaitu sebagian besar karena tidak dikuasai sebanyak 5 (62,5%) permohonan, selain itu karena termasuk informasi dikecualikan sebanyak 2 (25,00%) permohonan dan belum didokumentasikan sebanyak 1 (12,50%) permohonan. Selama tahun 2020, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik terhadap PPID Badan POM. Namun, PPID Badan POM menerima 1 panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat.

Berbagai strategi inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik tentang pengawasan Obat dan Makanan terus dilakukan. Beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain penerbitan Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM), aplikasi Sistem Informasi Manajeman Pengetahuan dan Informasi (Aplikasi SIMPONI), peluncuran aplikasi Sistem Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Aplikasi SIPOPON), serta menambahkan tautan informasi serta merta dari situs resmi Badan POM ke akun resmi Instagram @bpom_ri. Selain itu, dilakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, khususnya dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain melalui menu “BPOM Tanggap COVID-19” di laman utama *website* Badan POM; penerbitan e-book, pelaksanaan webinar dan *focus group discussion* tentang keamanan Obat dan Makanan; edukasi yang lebih intensif melalui media sosial, media informasi digital seperti videotron, dan sebagainya.

Dukungan kebijakan, sistem, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana dan anggaran juga terus diupayakan untuk memperkuat tugas dan fungsi PPID Badan POM. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 antara lain pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik; revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan layanan informasi publik PPID; pemutakhiran informasi publik pada *subsite* PPID (www.ppid.pom.go.id), aplikasi PPID BPOM *mobile* dan media sosial (twitter @PPIDBadanPOM); pengembangan e-formulir PPID pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan, Seminar Keterbukaan Informasi Publik; serta Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID Badan POM.

Sebagai bukti komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik, Badan POM telah berhasil meraih Anugerah Badan Publik "Informatif" berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020. Badan POM berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik "Informatif" dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,99.

Dalam upaya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan baik secara internal maupun eksternal. Beberapa rekomendasi perbaikan perlu dilakukan antara lain melalui penguatan regulasi; peningkatan kompetensi SDM; pemanfaatan teknologi informasi khususnya terkait pendokumentasian, pengumuman dan pelayanan informasi publik; peningkatan publikasi informasi publik melalui berbagai media; optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan SOP secara konsisten; peningkatan kecepatan waktu layanan informasi publik; peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal implementasi keterbukaan informasi publik.

Badan POM raih Peringkat ke-5 Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik “INFORMATIF”

(Jakarta, 25 November 2020)

Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	**1**
RINGKASAN EKSEKUTIF	**2**
DAFTAR ISI	**5**
DAFTAR LAMPIRAN	**6**
DAFTAR GAMBAR	**7**
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM	**8**
A. Tugas dan Fungsi	**9**
B. Struktur Organisasi PPID Badan POM	**9**
C. Visi PPID Badan POM	**10**
D. Misi PPID Badan POM	**10**
E. Maklumat Layanan PPID Badan POM	**10**
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM	**19**
A. Sarana Layanan	**19**
B. Sumber Daya Manusia (SDM)	**21**
C. Anggaran	**21**
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	**22**
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak	**22**
B. Waktu Yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan	**22**
BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	**28**
A. Kendala Eksternal	**28**
B. Kendala Internal	**29**
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	**30**

Daftar Lampiran

		Hal
Lampiran 1	DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID TAHUN 2020.....	**31**
Lampiran 2	TABEL ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PPID TAHUN 2020.....	**39**
Lampiran 3	REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020.....	**40**
Lampiran 4	LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID TAHUN 2020.....	**57**
Lampiran 5	REGISTER PENGAJUAN KEBERATAN TAHUN 2020.....	**58**

Daftar Gambar

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID Badan POM.....	**10**
Gambar 1.2	Tampilan menu baru pada subsite PPID (www.ppid.pom.go.id) dan aplikasi PPID BPOM *mobile*.....	**12**
Gambar 1.3	e-Formulir PPID pada Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan.....	**13**
Gambar 1.4	Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.....	**14**
Gambar 1.5	Rapat Koordinasi Teknis PPID Badan POM Tahun 2020.....	**15**
Gambar 1.6	Sosialisasi e-Formulir PPID.....	**16**
Gambar 1.7	Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial.....	**17**
Gambar 1.8	Kolaborasi Badan POM dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Publik di Masa Pandemi COVID-19.....	**18**
Gambar 2.1	Ruang Tunggu Layanan.....	**20**
Gambar 2.2	Ruang Layanan Informasi Publik.....	**20**
Gambar 2.3	Profil Pendidikan SDM PPID Badan POM Tahun 2020.....	**21**
Gambar 3.1	Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020.....	**22**
Gambar 3.2	Profil Profesi Pemohon Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2020.....	**22**
Gambar 3.3	Tujuan Pemohon Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2020.....	**23**
Gambar 3.4	Profil Waktu Layanan Permohonan Publik PPID Badan POM Tahun 2020.....	**23**
Gambar 3.5	Profil Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2020.....	**24**
Gambar 3.6	Tampilan Subsite PPID.....	**26**
Gambar 3.7	Tampilan Twitter PPID Badan POM.....	**27**

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM

Pasal 28F Undang – Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap warga negara mendapat hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan setiap badan publik melaksanakan keterbukaan informasi publik. Seiring dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM yang memiliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi, dan membuat laporan rekapitulasi layanan informasi yang diterima Badan POM.

Pada tahun 2018, struktur organisasi PPID mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Badan POM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi PPID di Badan POM, Koordinator PPID Badan POM dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan. Pada tahun 2020, dibentuk Tim Koordinasi PPID yaitu beranggotakan perwakilan dari unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HM.06.2.25.04.20.10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah.

Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman.

Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menciptakan masyarakat

cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Keterbukaan informasi publik medorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan *good and clean gorvernance* (kepemerintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Badan POM.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas PPID Badan POM yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang:
   a. wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
   b. wajib diumumkan secara serta merta; dan
   c. wajib tersedia setiap saat.
3. Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/ diterima dan diberikan.

B. Struktur Organisasi PPID Badan POM

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, struktur organisasi PPID Badan POM terdiri atas Koordinator PPID yang membawahi 4 (empat) bidang, dengan tugas sebagai berikut:

1. Koordinator PPID bertugas mengkoordinir pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Bidang Pelayanan Informasi bertugas menerima permintaan informasi dan pengaduan publik serta menindaklanjutinya.
3. Bidang Pengelolaan Informasi bertugas menyajikan informasi publik melalui website
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip bertugas menyediakan informasi publik dari unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas memberikan bantuan hukum terkait sengketa informasi publik.

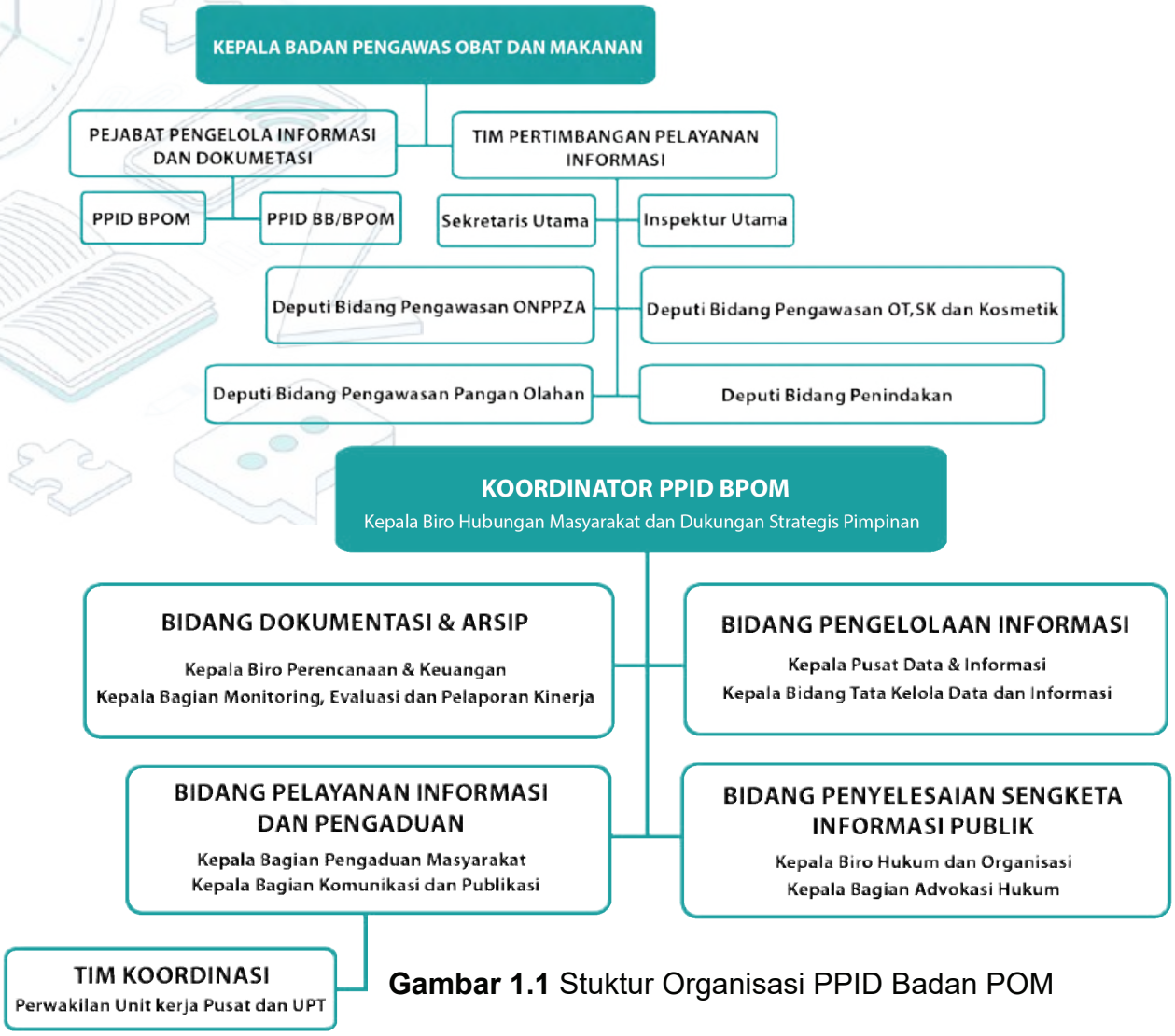

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi PPID Badan POM

C. Visi PPID Badan POM

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

D. Misi PPID Badan POM

Adapun misi PPID Badan POM yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas

E. Maklumat Layanan PPID Badan POM

"Dengan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM menyatakan: Sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

Pada tahun 2020, Badan POM berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik "INFORMATIF" dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,99. Adapun upaya-upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Badan POM yang dilakukan selama tahun 2020, yaitu:

a. Pada Januari – Maret 2020 telah dilakukan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik. Hasil pembahasan berupa Rancangan Peraturan Badan POM dapat diakses masyarakat pada Subsite PPID.

b. Pada April - Agustus 2020 telah dilakukan pembahasan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan layanan informasi publik PPID. Pada tahun 2019 PPID Badan POM telah memiliki 1 (satu) SOP yang mengatur ke-7 proses pengelolaan layanan informasi publik PPID, namun salah 1 (satu) rekomendasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan KIP, mewajibkan Badan Publik untuk menerbitkan 7 (tujuh) SOP yang mengatur pengelolaan informasi publik PPID, sehingga pada 14 Agustus 2020 Badan POM menerbitkan 7 (tujuh) SOP baru pengelolaan PPID yang terdiri atas:
   i. POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Pengelolaan Permohonan Informasi Publik
   ii. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik
   iii. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Penanganan Sengketa Informasi Publik
   iv. POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
   v. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Pengujian tentang Konsekuensi
   vi. POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pendokumentasian Informasi Publik
   vii. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

c. Pada Januari - Desember 2020, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik pada *subsite* PPID (www.ppid.pom.go.id) dan aplikasi PPID BPOM *mobile*, dengan tambahan menu yaitu:
   i. Profil dan LHKPN Pimpinan
   ii. Register pemohon informasi publik
   iii. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik PPID
   iv. BPOM tanggap COVID-19

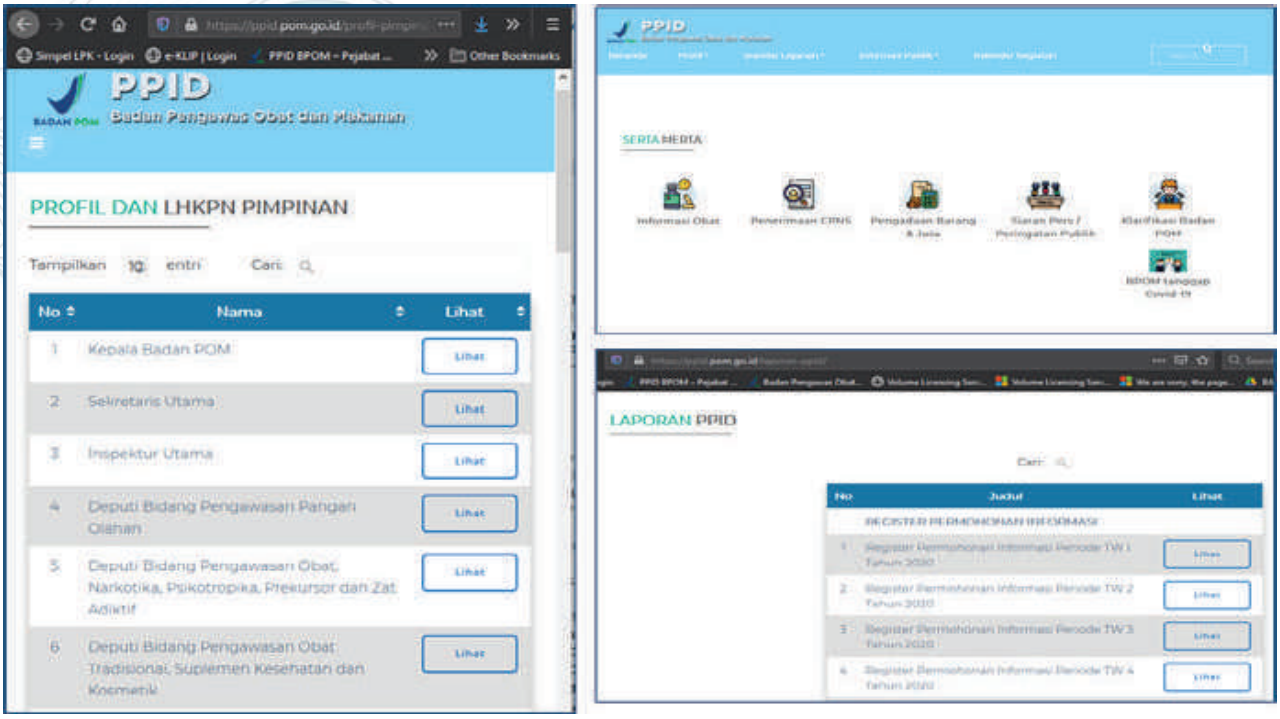

Gambar 1.2 Tampilan menu baru pada *subsite* PPID (www.ppid.pom.go.id) dan aplikasi PPID BPOM *mobile*

d Pada Maret – Oktober 2020 telah dilakukan pengembangan e-formulir PPID pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (aplikasi SimPeL). Dengan adanya e-formulir PPID, akan memudahkan petugas PPID untuk mencetak secara otomatis formulir pelayanan PPID, yang selama ini dibuat secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

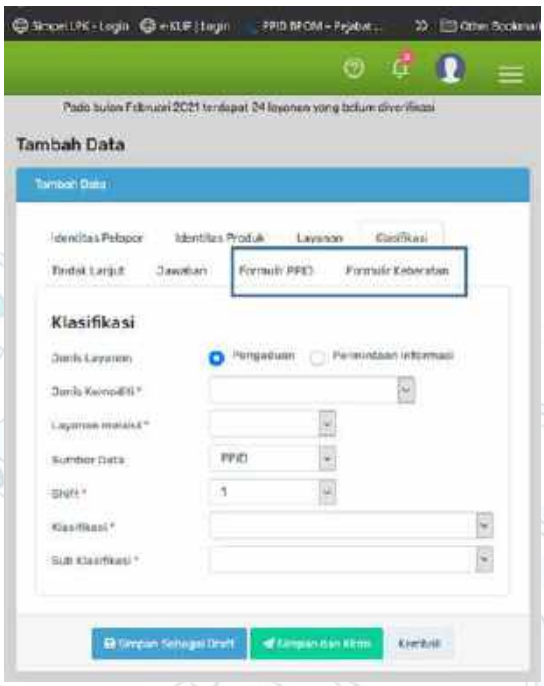

Gambar 1.3 e-Formulir PPID pada Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan

e Pada Juli 2020 diselenggarakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik, dengan mengusung tema “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Wujudkan Badan POM yang Informatif’. Seminar ini diselenggarakan secara daring pada tanggal 30 Juli 2020 bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi pengelolaan layanan informasi publik di Badan POM. Narasumber kegiatan ini yaitu:

i. Bayu Wibisono (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan selaku Koordinator PPID Badan POM), dengan judul materi “Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik”.

ii. Titi Susanti (Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi selaku perwakilan PPID Kementerian Keuangan), dengan judul materi “Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik di Kementerian Keuangan”.

iii. Nurvika Widyaningrum (Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat selaku PPID Badan POM Bidang Layanan Informasi), dengan judul materi “Pengelolaan Layanan Informasi dan Monev Keterbukaan Informasi Publik”.

Gambar 1.4 Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020

f Pada Desember 2020 diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID Badan POM, mengusung tema “Badan POM Informatif, Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik”, diselenggarakan secara daring pada Kamis, 17 Desember 2020 dan diikuti oleh 217 peserta yang terdiri dari PPID Badan POM, PPID Balai Besar/Balai POM dan Tim Koordinasi PPID. Seminar ini menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber, yaitu:

i. Wafa Patria Umma (Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi), dengan judul materi “Monitoring dan Evaluasi serta Indeks Keterbukaan Informasi Publik”
ii. Titi Susanti (PPID Kementerian Keuangan), dengan judul materi “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan”
iii. Yudianto (Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan), dengan judul materi “Penguatan Implementasi KeterbukaanInformasi Publik di Badan POM”

Adapun rekomendasi yang dihasilkan pada Rakontek PPID Badan POM Tahun 2020, yaitu:

1. Perlu dilakukan restrukturisasi organisasi PPID Badan POM untuk menyesuaikan dengan adanya organisasi dan tata kerja baru, termasuk pelaksanaan layanan PPID oleh Loka POM.
2. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik melalui pembenahan internal perlu didukung oleh seluruh unit kerja di Badan POM. Komitmen dan implementasi keterbukaan informasi publik oleh setiap unit kerja dapat dinilai melalui pelaksanaan monev internal keterbukaan informasi publik.
3. Penyusunan *tools*, sosialisasi hingga pelaksanaan monev internal akan dilakukan pada Januari – Juli 2021. Sebagai tahap awal dapat dilakukan terhadap Balai Besar/Balai POM yang telah memiliki PPID.
4. Perlu dibuat kebijakan tertulis tentang pedoman pelaksanaan monev internal keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan POM.
5. Pelaksanaan monev internal perlu dilakukan secara rutin dan akan memanfaatkan teknologi informasi.

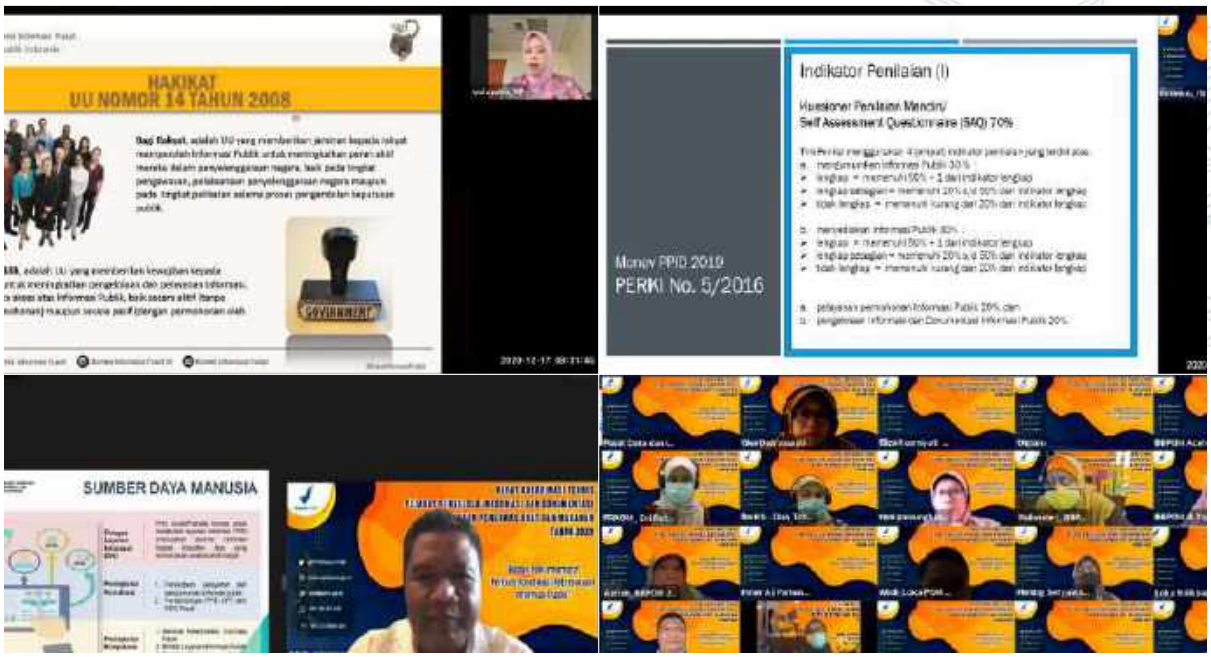

Gambar 1.5 Rapat Koordinasi Teknis PPID Badan POM Tahun 2020

g Pada Desember 2020, dilakukan Sosialisasi e-PPID, yang dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan peserta sebanyak 142 orang dari Tim Koordinasi PPID dan PPID Badan POM. Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu:

i. Nurvika Widyaningrum (Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat selaku PPID Badan POM Bidang Layanan Informasi), dengan judul materi "Penguatan PPID melalui Inovasi e-formulir PPID".

ii. Fauziah Mappamasing (Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi), dengan judul materi "Pengelolaan Layanan Informasi Publik Melalui PPID di Lingkungan Badan POM"

iii. Oke Dwiraswati, dengan judul materi "Tata Laksana e-Formulir PPID".

Gambar 1.6 Sosialisasi e-Formulir PPID

h Sepanjang tahun 2020, PPID Badan POM mengumumkan konten informasi publik melalui twitter@PPIDBadanPOM. Media sosial twitter merupakan media sosialisasi keterbukaan informasi publik yang berbiaya ringan, sehingga menjadi salah satu kanal penyampaian informasi publik PPID Badan POM. Adapun informasi publik dipublikasikan selama tahun 2020, diantaranya:

i. Laporan Keuangan (Audited) Badan POM
ii. Dokumen Perencanaan Kinerja Badan POM Tahun 2020
iii. Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2019
iv. Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2019
v. Rencana Strategis Badan POM 2020-2024
vi. Akses Informasi Publik Berkala Badan POM pada *Subsite* ppid@pom.go.id
vii. Data Layanan Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2019
viii. Media Layanan Informasi Publik PPID Badan POM di Masa Pandemi
ix. Informasi Regulasi Badan POM
x. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 1.7 Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial

i Sepanjang tahun 2020, Badan POM berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, khususnya dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, diantaranya:

i. Kolaborasi Badan POM bersama TNI AD, Badan Intelijen Negara dan Universitas Airlangga dalam menyediakan informasi publik tentang hasil uji klinik obat kombinasi baru untuk COVID-19.

ii. Kolaborasi Badan POM bersama Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Pusat Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kementerian Kesehatan RI, PT Biofarma dalam penyebaran informasi publik tentang perkembangan uji klinis vaksin COVID-19.

iii. Kolaborasi Badan POM dengan GP Jamu dan pelaku usaha jamu dalam penyebarluasan informasi publik khasiat dan kegunaan jamu bagi kesehatan.

iv. Badan POM kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB) pada Konferensi Pers “Penggunaan Dexamethasone Dan Hydroxychloroquine dalam Masa Pandemi COVID-19”.

v. Kolaborasi Badan POM dengan BNPB dalam penyebarluasan informasi publik tentang keamanan pangan di tengah pandemi.

vi. Kolaborasi Badan POM dengan Pemprov Bali dalam penyebarluasan informasi publik tentang keamanan Obat dan Makanan di tengah pandemi.

vii. Kolaborasi Badan POM dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *youtuber,* dan *public figure* dalam penyebarluasan informasi penyalahgunaan obat di era *new normal.*

viii. Kolaborasi Badan POM dengan berbagai kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Negara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), media massa, tokoh masyarakat, komunitas masyarakat dan pelajar, dan *public figure.*

Gambar 1.8 Kolaborasi Badan POM dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Publik di Masa Pendemi COVID-19

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM

A. Sarana Layanan

Ketersediaan sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik di Badan POM. Berbagai inovasi media layanan informasi diciptakan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Adanya kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, menyebabkan adanya pengalihan layanan PPID secara *online* dan meniadakan layanan datang langsung. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Badan POM. Pada Tahun 2020 terdapat 8 (delapan) media layanan PPID Badan POM yaitu:

Aplikasi Android	:	PPID BPOM *mobile*
Telepon	:	021-426.3333
Subsite PPID	:	https://ppid.pom.go.id/
Email	:	ppid@pom.go.id
Alamat Surat/ Datang Langsung	:	PPID Badan POM Gedung Pelayanan Publik, lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560.
Media Sosial	:	Twitter@PPIDBadanPOM
Website Badan POM	:	https://www.pom.go.id/new/

Gambar 2.1 Ruang Tunggu Layanan

Gambar 2.2 Ruang Layanan Informasi Publik

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID Badan POM didukung oleh SDM sebanyak 23 orang, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (43,48%), Apoteker (34,78%), dan Magister (21,74%).

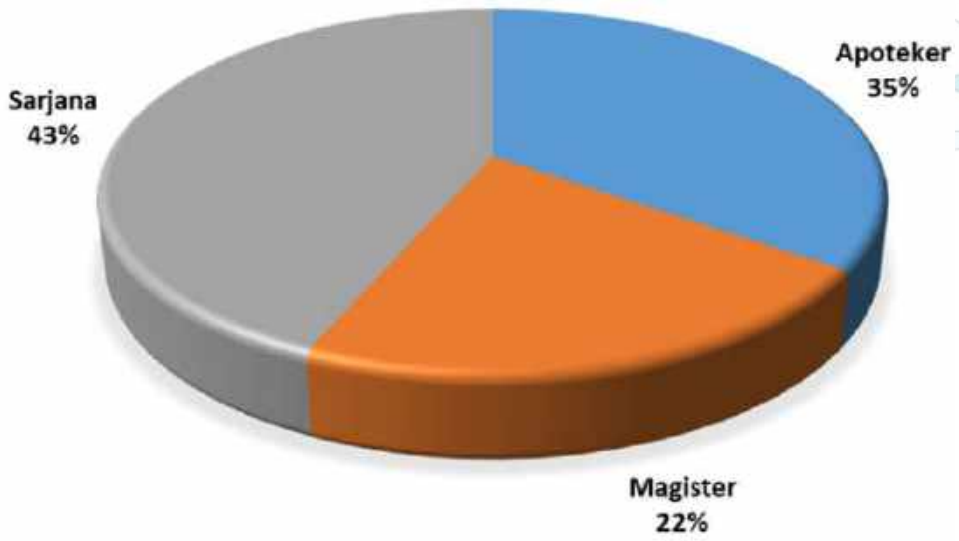

Gambar 2.3 Profil Pendidikan SDM PPID
Badan POM Tahun 2020

Adanya perkembangan kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga menuntut Badan POM untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini. Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai peningkatan kompetensi, baik yang diselenggarakan internal Badan POM, maupun yang diselenggarakan instansi lain. Adapun daftar peningkatan kompetensi SDM PPID Badan POM pada tahun 2020 sebagaimana Lampiran 1.

C. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik pada tahun 2020 sebesar Rp. 32.339.716.000,- dan realisasi anggaran sebesar 98,94% (Rp. 31.997.401.408,-). Rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2020, PPID Badan POM telah menerima 16 permohonan informasi, dengan profesi pemohon informasi didominasi oleh pelajar/mahasiswa 50%. Terdapat 50% permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, 31,25% permohonan ditolak dan 18,75% permohonan dikabulkan sebagian. Matriks Register Pemohon Informasi Publik dan Laporan Singkat Layanan Informasi PPID Badan POM Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

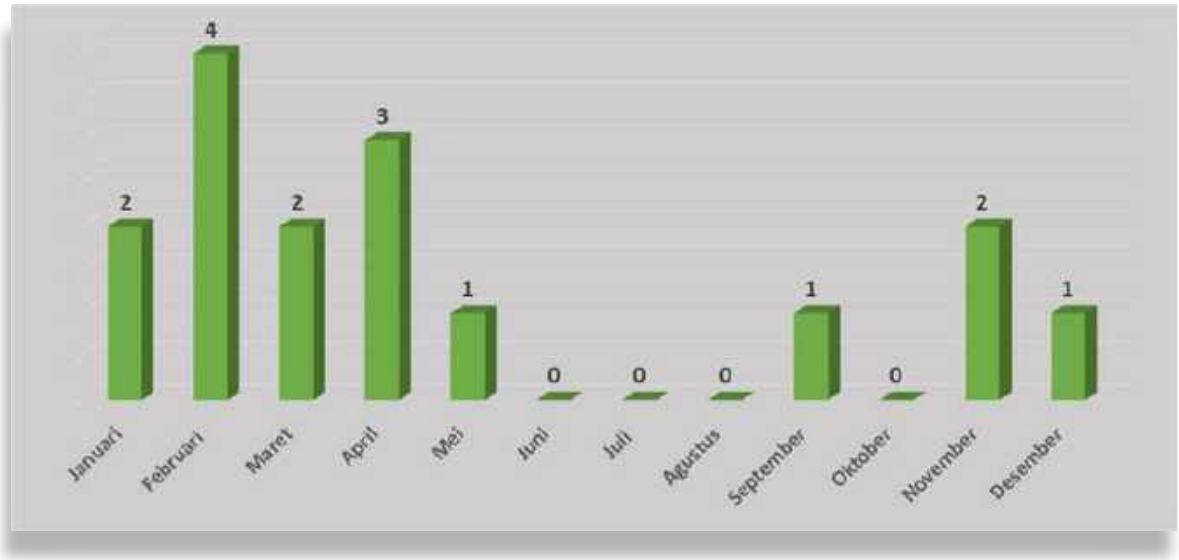

Gambar 3.1 Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

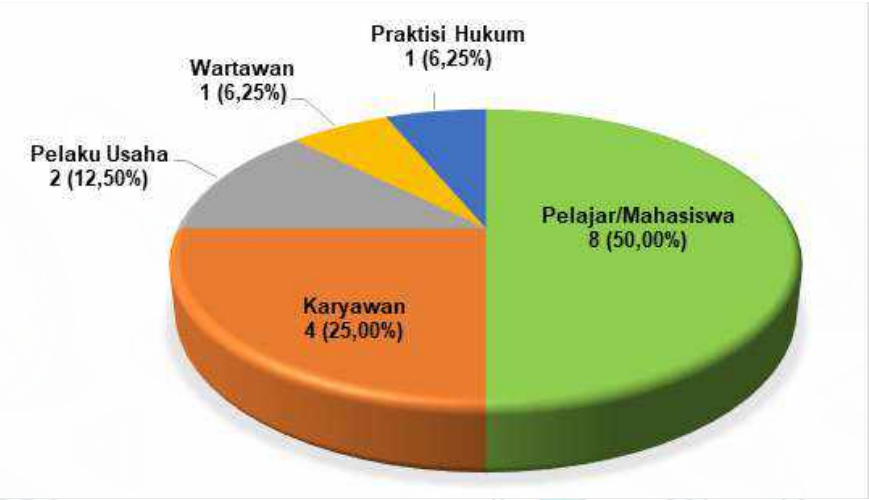

Gambar 3.2 Profil Profesi Pemohon Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2020

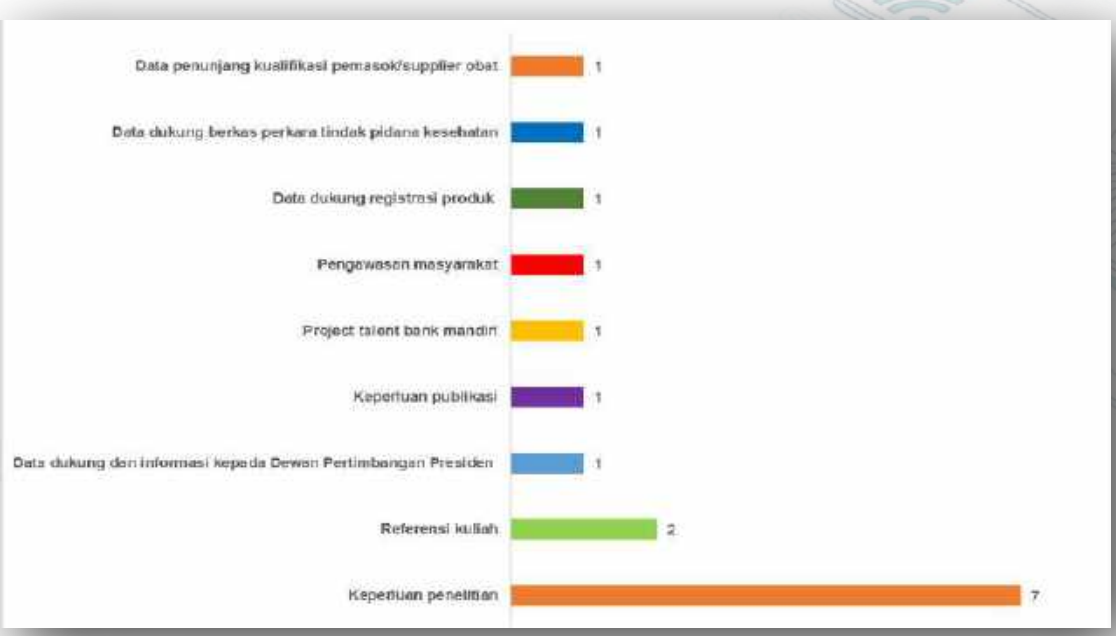

Gambar 3.3 Tujuan Pemohon Informasi Publik
PPID Badan POM Tahun 2020

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2020, PPID Badan POM melayani 16 permohonan informasi, dengan rata-rata waktu layanan permohonan informasi 8,25 hari kerja. Terdapat 11 (68,75%) permohonan informasi yang memerlukan waktu 1-10 hari kerja dan terdapat 5 (31,25%) permohonan informasi yang memerlukan waktu 11-17 hari kerja dalam penyelesaiannya. 100% layanan permohonan informasi publik memenuhi *Service Level Agreement (SLA)* yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja. Matriks Rata-Rata Waktu Layanan Perbulan sebagaimana terlampir pada Laporan Singkat Layanan Informasi PPID (Lampiran 4).

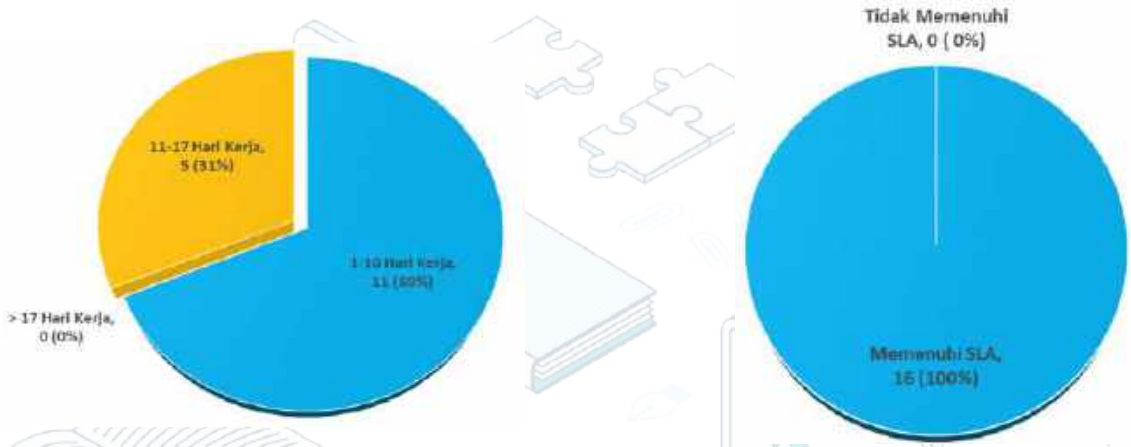

Gambar 3.4 Profil Waktu Layanan Permohonan Publik PPID Badan POM
Tahun 2020

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Pada tahun 2020, terdapat 8 (50%) permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, 5 (31,25%) permohonan ditolak dan 3 (18,8%) permohonan dikabulkan sebagian. Permohonan informasi yang ditolak dan dikabulkan sebagian karena terdapat informasi publik yang dimohon termasuk dalam informasi dikecualikan yang apabila diberikan kepada pemohon akan menghambat proses penegakan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu terdapat informasi publik yang belum didokumentasikan dan tidak dikuasai Badan POM.

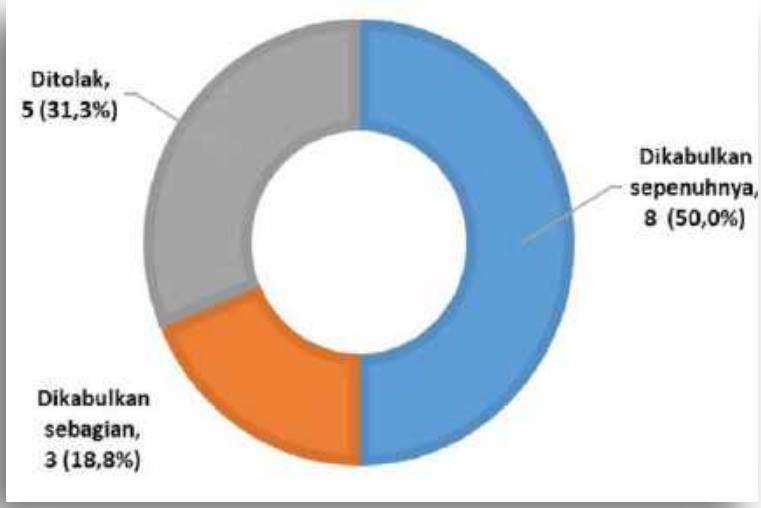

Gambar 3.5 Profil Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2020

D. Jumlah keberatan yang diterima

Selama tahun 2020, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik terhadap PPID Badan POM.

E. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2020, PPID Badan POM menerima 1 (satu) panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat. Sidang sengketa ini merupakan kelanjutan dari pengajuan keberatan yang diajukan pemohon pada 16 Oktober 2019 karena PPID Badan POM tidak mengabulkan sepenuhnya (mengabulkan sebagian) permohonan informasi pemohon yang diajukan pada 23 Agustus 2019 dan 2 September 2019, dengan alasan penolakan dokumen yang dimohonkan terkait perkara hukum. Sidang pertama dilaksanakan pada hari senin, 21 Desember 2020, dan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2021.

F. Pemutakhiran Informasi Publik

1. **Pemutakhiran Informasi Publik di Subsite ppid.pom.go.id**

   Selama tahun 2020, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di *subsite* ppid.pom.go.id, antara lain:

   - Pemutakhiran Laporan Singkat/Ringkasan Laporan PPID selama Tahun 2020
   - Pemutakhiran Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Balai POM di Gorontalo Tahun 2019 sesuai permohonan dari Balai
   - Penayangan informasi berupa Laporan PPID Tahun 2019
   - Penayangan informasi berupa Laporan Kinerja seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019
   - Penayangan informasi berupa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Eselon I periode 2020-2024
   - Pemutakhiran Revisi SOP Layanan PPID
   - Perjanjian Kinerja Badan POM, Unit Eselon I, dan seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020
   - Pemutakhiran Profil PPID Badan POM
   - Pemutakhiran Dasar Hukum PPID :
     - a Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HM.06.2.25.04.20.10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
     - b Surat Keputusan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan POM Nomor HM.06.25.252.08.2-.12 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan POM
     - c Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019

d Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Tahun 2020

- Profil dan LHKPN Pimpinan (Kepala Badan POM, Eselon I, dan Kepala Unit Kerja/ Balai Besar/Balai POM)
- Update Kalender Kegiatan Tahun 2020
- Laporan Tahunan Badan POM dan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019
- Register Permohonan Informasi Publik Triwulan I-IV Tahun 2019 dan Trwulan I-IV Tahun 2020
- Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan PPID Tahun 2020
- Galeri: Berita Aktual "Seminar Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan POM yang Informatif" pada 18 Agustus 2020
- Galeri: Berita Aktual "BPOM Informatif, Perkuat Keterbukaan Informasi di Masa Pandemi COVID-19", pada 7 Oktober 2020
- Galeri: Berita Aktual "Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, Badan POM Buktikan Diri Sebagai Badan Publik Informatif" pada 26 November 2020
- Galeri: Berita Aktual "Badan POM Informatif, Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik" pada 21 Desember 2020

2. Pemutakhiran Informasi Publik di Media Sosial (Twitter @PPIDBadanPOM)

Selama tahun 2020, telah dilakukan penayangan informasi publik berupa narasi dan infografis di media sosial yaitu Twitter @PPIDBadanPOM, antara lain:

- Maklumat PPID Badan POM.
- Jenis Informasi Publik yang wajib disediakan.
- Layanan Informasi di saat Pandemi COVID-19.
- Data Layanan Informasi tahun 2019.
- Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- Informasi yang Dikecualikan.
- Informasi yang Dikecualikan.
- Informasi yang Dikecualikan.

Gambar 3.6
Tampilan Subsite PPID

- Akses Informasi Publik Berkala di Badan POM.
- Kolaborasi Badan POM dalam Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Partisipasi BPOM dalam Sosialisasi Monev KIP 2020.
- Laporan Kinerja Badan Badan POM 2019.
- Seminar Keterbukaan Informasi Publik.
- Laporan Keuangan (Audited) Tahun 2019.

- Rencana Strategis Badan POM 2020-2024.
- Dokumen perencanaan kinerja tahun 2020.
- Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2019.
- Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan POM Semester I Tahun 2020
- Laporan Tahunan Badan POM 2019.
- Informasi tentang Badan POM Tanggap COVID-19.
- Hak Atas Informasi.
- Hari Hak untuk Tahu Sedunia.
- Persentasi pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020.
- Video Inovasi dan Kolaborasi PPID Badan POM.
- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif.
- Rapat Koordinasi Teknis PPID Badan POM 2020.

Gambar 3.7 Tampilan Twitter PPID Badan POM

BAB IV
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal

Kendala eksternal layanan informasi publik yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga layanan informasi publik PPID yang merupakan kanal informasi resmi suatu instansi, belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas dalam mengakses informasi.

2. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk pengembangan masyarakat secara individu maupun sosial, melindungi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan Badan Publik, serta merupakan upaya mengembangkan masyarakat informatif. namun pada kenyataannya, dalam implementasi keterbukaan ninformasi publik terdapat pihak yang memanfaatkan implemetasi keterbukaan informasi tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya untuk menghasut dan mencari-cari kesalahan penyelenggara negara.

3. Dimasa pandemi COVID-19, kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang tinggi dan maraknya penyebarluasan informasi dari sumber yang tidak resmi melalui media sosial, sehingga peran PPID sebagai kanal resmi instansi dalam penyebaran informasi publik perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat dari hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat.

4. Masih adanya daerah terpencil yang terbatas dalam akses jaringan internet, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Hal ini menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan keterbukaan informasi publik dalam membentuk masyarakat yang informatif, yang terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggara negara dan Badan Publik.

Kendala Internal

Kendala internal layanan informasi publik, yaitu:

1. Masih terdapat kebijakan Badan POM yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu PPID Badan POM telah menyusun Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Layanan Informasi publik , namun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yang menjadi acuan Badan POM dalam penyusunan rancangan peraturan tersebut sedang dalam proses revisi, dan hingga akhir tahun 2020 revisi peraturan belum terbit. Oleh karena itu revisi peraturan Badan POM masih terkendala menunggu terbitnya revisi Peraturan Komisi Informasi tersebut.

2. Masih terdapat pegawai Badan POM yang belum mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik berupa layanan permohonan informasi publik PPID, sehingga masih terdapat pengelolaan layanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan oleh unit kerja tanpa melibatkan PPID sebagai kanal pelayanan permohonan informasi publik.

3. Kurangnya pemahaman petugas layanan informasi Balai Besar/Balai POM terhadap pengelolaan layanan informasi publik PPID, sehingga masih terdapat petugas yang tidak dapat membedakan layanan PPID dan Layanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Masih terdapat layanan permohonan informasi publik yang merupakan layanan PPID, namun dilayani oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen.

BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Untuk dapat mempertahankan capaian tahun 2020 dan meningkatkan nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2021, maka Badan POM perlu melakukan pembenahan internal sebagai berikut:

1. **Penguatan regulasi**
   - Finalisasi dan penetapan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Layanan Informasi publik
   - Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 6 tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPOM Peraturan Kepala Badan POM
   - Revisi Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi PPID di Badan POM
   - Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Publik
   - Review SOP Layanan Informasi Publik
2. **Peningkatan kompetensi sumber daya manusia**
   - Peningkatan koordinasi dalam penyediaan, pelayanan dan pengumuman informasi publik serta pendampingan PPID UPT oleh PPID Pusat
   - Peningkatan kompetensi petugas PPID melalui bimtek, seminar, *benchmarking best practice* ke badan publik lainnya.
3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi, khsusnya terkait pendokumentasian, pengumuman dan pelayanan informasi publik**
4. **Pengembangan menu PPID pada *website* dan *subsite* (Pusat dan UPT untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik Badan POM.**
   - Elektronisasi formulir layanan informasi publik melalui aplikasi Simpel sehingga mempercepat proses layanan informasi.
   - Pemanfaatan *sharing folder* dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan *updating* informasi publik.
   - Pengembangan aplikasi e-monev yang terhubung dengan *subsite* PPID untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi internal.
5. **Peningkatan publikasi informasi publik melalui berbagai media**
6. **Optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu layanan informasi publik, peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor**
7. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal implementasi keterbukaan informasi publik.**

LAMPIRAN 1

DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
PPID BADAN POM TAHUN 2020

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
1	*Workshop "Integrating Health Services In Disaster Management System Using Digital Information Platform"*	Jakarta	17 Februari 2020	*School of Bussiness Management Institut* Teknologi Bandung (SBM ITB)
2	*Knowledge Sharing* Forum Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia Dan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tatalaksana Registrasi Obat	Jakarta	19 Februari 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
3	Pembahasan Materi *Knowledge Base Contact Center* Terkait Registrasi Dan Regulasi Pengawasan Kosmetika	Jakarta	6 Maret 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
4	Konsultasi Publik Online Penyusunan Pedoman Pencegahan Covid-19 Dalam Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan	Online	9 April 2020	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
5	*E-Learning* Pelajari Dasar Keahlian Berpikir Kritis	Web Online	12 April 2020	*Skill Academy*
6	Talkshow "Perlindungan Konsumen Belanja Online Di Masa Covid 19"	Zoom meeting	20 April 2020	Kementerian Perdagangan
7	Penatalaksanaan Pasien Osetoartitis	Swipe Rx	22 April 2020	Swipe RX - IAI
8	Webinar I Covid-19 : Mengenal Covid-19 Dan Tatalaksana Covid-19	Webinar SIAP	23 April 2020	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
9	Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Covid-19 Di Indonesia	Webinar	30 April 2020	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
10	Sosialisasi Online Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Covid-19 Di Indonesia	Webinar	30 April 2020	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
11	*Webinar - Customer Service In The Time Of COVID 19*	Webinar	30 April 2020	*The Bridge Academy*
12	Komunikasi Dalam Pelayanan Kefarmasian Pada Pasien Hipertensi	Aplikasi Farmas Edu	1 Mei 2020	Farma Edu - IAI
13	Farmakoterapi Hipertensi Dan Penatalaksanaan Hipertensi	Aplikasi Farmas Edu	2 Mei 2020	Farma Edu - IAI
14	Sosialisasi RB Online, "Program, Kegiatan, Target Dan Indikator Kinerja Manajemen Perubahan Dan Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi BPOM"	Webinar	5 Mei 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Sosialisasi Dan Edukasi Obat Untuk Penanggulangan COVID-19	Webinar	8 Mei 2020	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
16	Sosialisasi Dan Internalisasi Kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024	Webinar	13 Mei 2020	Inspektorat Utama BPOM
17	Kegiatan Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) Obat Dan Makanan Secara Daring Dengan Tema “Hidup Sehat Dengan Obat Dan Makanan Aman Di Tengah Pandemi COVID-19	Webinar	15 Mei 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
18	Webinar Bincang-Bincang Umkm Kosmetik	Webinar	19 Mei 2020	Direktorat Pengawasan Kosmetik

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
19	Kuliah Telegram “Tata Cara Memperoleh Izin Edar Produk Pangan”	Telegram	19 Mei 2020	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
20	Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era “Normal Baru”	Zoom meeting	29 Mei 2020	Universitas Airlangga dan Sekretariat Jenderal DPR RI
21	*Knowledge Sharing* Forum Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia Dan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tatalaksana Registrasi Obat	Jakarta	29 Mei 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
22	Sharing Santai: Pengelolaan Akun Media Sosial Official	Jakarta	2 Juni 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
23	Webinar Microsoft & Icca “*Enabling Reliable Customer Service During Difficult Time*”	Microsoft Teams	3 Juni 2020	Telexindo Bizmart
24	Sosialisai Online Reformasi Birokrasi “Program, Kegiatan, Target Dan Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Publik BPOM”	Google meet	4 Juni 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Webinar Word Safety Day "Keamanan Pangan Sedunia" Di Era New Normal	Webinar	10 Juni 2020	Kedeputian III
26	Seminar Strategi Media Kie (Digital Media Recomendation)	Webinar	11 Juni 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
27	"New Normal" Perilaku Hidup Sehat, Bijak Pilih Obat Dan Suplemen Kesehatan Selama Pandemi COVID-19	Webinar	13 Juni 2020	Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
28	Government Roundtable "COVID-19: NEW, NEXT, POST"-Komunikasi Publik Di Era Digital	Webinar	15 Juni 2020	MarkPlus
29	Sosialisasi Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan	Webinar	16 Juni 2020	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
30	Sosialisasi Perbpom No.8 Tahun 2020 Ttg Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring	Webinar	18 Juni 2020	Biro Hukum dan Organisasi
31	Sosialisasi Jurnal Ilmiah Pengawasan Obat Dan Makanan	Webinar	19 Juni 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
32	NGUPAS (Ngobrol Kupas Cerdas) Dengan Topik "Perspektif Keterbukaan Informasi Publik Di Era Adaptasi	Webinar	26 Juni 2020	Kemenenterian Sekretariat Negara
33	Sharing Santai Penyusunan Jurnal Ilmiah, Implementasi Kip, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Webinar	2 Juli 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
34	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Webinar	10 Juli 2020	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
35	Webinar: “Generasi Muda Produktif, Cerdas, Dan Tolak Penyalahgunaan Obat Di Era New Normal”	Webinar	14 Juli 2020	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
36	Sosialisasi Peraturan Badan POM No.8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetika Yang Diedarkan Secara Daring	Webinar	14 Juli 2020	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
37	Workshop Penerapan Manajemen Pengetahuan Bpom	Webinar	23 Juli 2020	Pusat Pengembang an Sumber Daya Manusia
38	Seminar Keterbukaan Informasi Publik	Webinar	30 Juli 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
39	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2020 "Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika"	Webinar	5 Agustus 2020	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
40	Self-Learning: Why It's Essential For You In The Industry 4.0	Webinar	6 Agustus 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
41	Knowledge Sharing Forum – Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik Dan Aplikasi Notifkos	Webinar	7 Agustus 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
42	In House Training Pembekalan Teknis Petugas Dalam Rangka Pengawasan Kosmetik	Hotel Double Tree By Hilton Jakarta	18 Agustus 2020	Direktorat Pengawasan Kosmetik
43	Workshop Modul Farmakovigilance Untuk Tenaga Kesehatan	Webinar	26 Agustus 2020	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika,

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
				Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
44	Sharing Santai Vol.3: Berbagi Inspirasi Bersama Dsp	Webinar	28 Agustus 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
45	Public Speaking	Webinar	4 September 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
46	Webinar Online“Assertive Communication Barries And How To Become Over”	Webinar	7 September 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
47	The Art Of Persuasive Communication (Seni Komunikasi Memenangkan Lobby Dan Negosiasi)	Webinar	8 September 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
48	Training Of Trainer Bagi Petugas Balai/Balai Besar POM Dalam Program Pelaporan Obat Substandar Dan Ilegal Termasuk Palsu Oleh Tenaga Kesehatan Melalui BPOM Mobile	Webinar	9 September 2020	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
49	Effective Communication Skill For Workplace Succes	Webinar	9 September 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	Inhouse Training "Skill Menulis Ringan Yang Impactfull Dan Powerfull"	Webinar	21 September 2020	Inspektorat Utama
51	Sosialisasi Peningkatan Budaya Pelaporan Obat Substandar Dan Ilegal Termasuk Palsu Oleh Tenaga Kesehatan Dan Pelaporan Efek	Webinar	9 Oktober 2020	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
	Samping Obat Oleh Masyarakat Melalui BPOM Mobile			Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
52	Pelatihan Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik, Benar, Dan Efektif Dalam Dokumen Substansi Pimpinan	Webinar	15 -17 Oktober 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
53	Pelatihan Creative Thinking	Webinar	22 Oktober 2020	Pusat Pengembang an Sumber Daya Manusia
54	Seminar Online Build Your Personal Branding With Productivity (How To Impress Your Boss)	Webinar	26 Oktober 2020	Pusat Pengembang an Sumber Daya Manusia
55	Sosialisasi SIKD	Webinar	27 Oktober 2020	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
56	Workshop Farmakovigilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Dan Keamanan Vaksin	Webinar	11November 2020	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
57	FGD Dengan Tema"Pemanfaatan Tanaman Arthemisia Spp., Ephedra Spp., Dan Mitragyna Speciosa Sebagai Bahan Baku Obat Tradisional"	Webinar	19 November 2020	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
58	Sosialisasi Farmakope Indonesia Edisi Vi	Webinar	30 November 2020	Direktorat Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
59	Webinar Monitoring Keamanan Obat Dan Vaksin Pada Uji Klinik Dan Pasca Pemberian EUA	Webinar	2 Desember 2020	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
60	Forum Diseminasi Riset Dan Kajian Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2020	Webinar	10 Desember 2020	Pusar Riset dan Kajian Obat dan Makanan
61	Sosialisasi Buku Saku Herbal Untuk Menghadapi Pandemi Covid 19	Webinar	14 Desember 2020	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
62	Talkshow Virtual "Infodemik: Bahaya Isu Obat Dan Makanan Di Tengah Pandemi"	Webinar	18 Desember 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
63	Sosialisasi Buku Panduan Pemasukan Obat Melalui Jalur Khusus (SAS/ *Special Access Scheme*/ SAS) Dan Panduan Dan Pelaksanaan Uji Klinik Selama Pandemi COVID-19	Webinar	22 Desember 2020	Direktorat Registrasi Obat
64	Sosialisasi E-Form Ppid Bpom	Webinar	30 Desember 2020	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
65	Pelatihan Bahasa Inggris, Bussiness English - Global	Webinar	7 Oktober - 3 Desember 2020	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN 2

TABEL ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PPID TAHUN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE (%)
1	Kegiatan Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	9.973.452.000	9.734.966.883	97,61
2	Pengelolaan teknologi, informasi komunikasi, data dan informasi Obat dan Makanan	22.366.264.000	22.262434525	99,54
	TOTAL	32.339.716.000	31.997.401.408	98,94

LAMPIRAN 3

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
1	PST-23012020-015	22/01/2020	Sally Indah Wiryadhina	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VI/ Jawa 1 Jl. Soekarno Hatta No. 486 Lt. 3 Bandung 40266	Email: sallyindahwiryadhina@gmail.com	Karyawan	- Data perusahaan farmasi di Indonesia - Data PBF di Indonesia - Data perkembangan industri farmasi di Indonesia	Untuk project talent bank mandiri terkait penetrasi perbankan di sektor farmasi	v	v	-	v	-	Mengetahui	Ya	Diberikan informasi sbb: 1. Data Perusahaan Farmasi di Indonesia yang telah memiliki sertifikat (CPOB) terlampir. 2. Data Pedagang PBF dan PBF Bahan Baku di Indonesia yang telah mendapatkan CDOB dan aktif beroperasi dapat diakses langsung melalui website https://sertifikasicdob	-	04/02/2020 melalui email	04/02/2020 melalui email	Tidak ada biaya	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
																.pom.go.id pada menu Sertifikat CDOB. 3. Data perkembangan Industri Farmasi di Indonesia, yaitu data kontribusi Industri Farmasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak dikuasai Badan POM. Disarankan menghubungi Kementerian Perindustrian.					

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
				Tangerang, Banten			2019? 2. Berapa rekomendasi impor rokok elektrik yang ditolak oleh BPOM tahun 2017, 2018 dan 2019? 3. Berapa banyak produk rokok elektrik yang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM?										dikuasai/tidak dimiliki Badan POM.	POM.				

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
3	PST-0302 2020-060	03/02/2020	Agung Darmawan	Biro Data dan Informasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Kementerian Sekretariat Negara RI	agung.darmawan@setneg.go.id	Karyawan	1. File Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019 2. Analisis/Statistik/Infografis Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Tahun 2019 dan tahun sebelumnya (sebagai perbandingan)	Untuk memberikan data dukung dan informasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden terkait topik Penanganan Makanan Ilegal/Tidak Sehat	v	-	v	v	v	-	Ya	Diberikan informasi melalui tanggapan tertulis sbb: 1. Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2019 hingga saat ini masih dalam proses penyusunan sehingga informasi tersebut belum dapat kami berikan. Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2019 akan dipublikasikan melalui website Badan POM, www.pom.go.id pada menu Laporan, sub menu Laporan Tahunan. 2. Data Perkara Tindak	Ada informasi yang belum didokumentasikan	18 Februari 2020	18 Februari 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
																Pidana Obat dan Makanan dari tahun 2015-2019 diberikan dalam matriks.					

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
4	PST-0402 2020-088	04/03/2020	Maya ng Sari	Jalan Laladon Gang 4 RT o2/07 No. 280 Desa Laladon, Kec. Ciomas, Kab Bogor	mayangsaarii@gmail.com	Pelajar/ Mahasiswa	Data tentang penggunaan boraks pada makanan terutama pada lontong, mie basah dan bakso di wilayah kota Bogor atau Jakarta atau Jawa Barat	Sebagai tambahan data yang valid untuk menyelesaikan skripsi	v	-	-	v	v	-	Ya	Diberikan informasi melalui tanggapan tertulis berisi Data Penyalahgunaan Boraks pada produk pangan di wilayah Kota Bogor, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.	-	10 Februari 2020	10 Februari 2020	-	-
5	PST-1702 2020-033	17/02/2020	Ni Putu Winda Apriyani	JL. Hangtuah No.17, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80227	windaapriyani02@gmail.com	Pelajar/ Mahasiswa	Statistik produk (kosmetik) yang mendapatkan izin edar di Indonesia periode tahun 2005-2019	Data dukung pengerjaan skripsi	v	-	-	v	v	-	Ya	Diberikan informasi melalui tanggapan tertulis berisi data jumlah Nomor Izin Edar (NIE)/notifikasi produk kosmetik yang diterbitkan Badan POM pada periode 2006-2019	-	4 Maret 2020	4 Maret 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
6	PST-2802 2020-008	28/02/2020	Chynt ania Anggr eni Laia	Jalan Bangau Sakti, RT.03/RW.05, Kec. Tampan, Kel. Simp. Baru, Pekanbaru, Riau - 28293	achyntania@gmail.com	Pelajar/ Mahasiswa	1. Data jumlah dan nilai ekonomi kosmetik ilegal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia pada Tahun 2015-2019 2. Jalur masuk kosmetik ilegal dari Malaysia ke Indonesia 3. Strategi yang diambil, khususnya BPOM dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal.	Data dukung pengerjaan skripsi	v	-	-	v	v	-	Ya	Diberikan informasi melalui tanggapan tertulis, sbb: 1. Data jumlah dan nilai ekonomi kosmetik ilegal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia pada Tahun 2018-2019 2. Jalur masuk kosmetik ilegal dari Malaysia ke Indonesia 3. Strategi yang diambil, khususnya BPOM dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal	-	11 Maret 2020	11 Maret 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
7	PST-1703 2020-007	17/03/2020	Chyntania Anggreni Laia	Jalan Bangau Sakti, RT.03/RW.05, Kec. Tampan, Kel. Simp. Baru, Pekanbaru, Riau - 28293	achyntania@gmail.com	Pelajar/ Mahasiswa	Data jumlah dan nilai ekonomi kosmetik ilegal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia pada Tahun 2015-2019	Data dukung pengerjaan skripsi	v	-	v	v	v	-	v	Diberikan informasi melalui tanggapan tertulis berisi data kosmetik ilegal dari Malaysia periode tahun 2015-2019, yaitu sebanyak 47.939 item produk dengan nilai ekonomi sebesar Rp.699.878.000.,-	-	19 Maret 2020	19 Maret 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
8	PST-1703 2020-057	17/03/2020	Oktaviany	Jl. AMD X No. 36 RT.10/ RW. 01 Petukangan Utara, Jakarta	oc.tatavia@gmail.com	Pelaku Usaha	Data Keracunan Makanan pada Tahun 2020-2015 atau pada Tahun 2020-2010, terkait statistik jumlah orang yang mengalami keracunan makanan yang diakibatkan proses pemilhan dan pengelolaan sampai distribusi yang salah sehingga perlu diterapkan HCCP sebagai indikator mutu makanan.	Dasar rumusan masalah dalam penulisan tesis	-	v	-	-	-	-	v	Permohonan ditolak. Diberikan informasi melalui tanggapan tertulis bahwa data tidak dikuasai/tidak dimiliki Badan POM	-	1 April 2020	1 April 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
9	PST-0604 2020-030	06/04/2020	Noviani Natalia Putri	Segeluh RT 03 RW 01 Kel Purwosari Kec Purwodadi Purworejo Jawa Tengah	noviani.natalia.putri@mail.ugm.ac.id	Pelajar/ Mahasiswa	Data kosmetikpalsu yang beredar di pasaran namun produk aslinya sudah memiliki izin dari BPOM dan Bagaimana ciri-ciri kosmetik palsu tersebut.	Untuk kepentingan Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta	v	-	-	v	v	-	v	Diberikan: - SK PPID ttg Penolakan Permohonan Informasi - Pemberitahuan Tertulis dan Tanggapan berisi alasan permohonan ditolak (termasuk informasi dikecualikan) dan informasi ciri kosmetik palsu	Informasi Dikecualikan	23 April 2020	24 April 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
10	PST-1604 2020-023	16/04/2020	Moh. Raihan Rizaldi Sutran	Kompleks Pasar Serui, Kepulauan Yapen, Prov. Papua	adam.rizaldy7@gmail.com	Pelajar/ Mahasiswa	data penyitaan pangan dan obat-obatan yang kadaluwarsa di Provinsi Papua	Referensi tugas kuliah dalam rangka Ujian Tengah Semester	v	-	-	v	v	-	v	Diberikan Pemberitahuan tertulis dan Tanggapan permohonan informasi berupa hasil pengawasan BPOM terhadap Obat dan Makanan kedaluwarsa di Provinsi Papua tahun 2019.	-	24 April 2020	25 April 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
11	'PST-1604 2020-051	16/04/2020	Danang Rizky Fadilla Amanta	Krendetan Rt 04/01, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	danang1900024212@webmail.uad.ac.id	Pelajar/ Mahasiswa	data produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM tetapi masih tetap diedarkan	Sbg bahan Ujian Tengah Semester mata kuliah Sistem Informasi Hukum	v	-	-	v	v	-	v	Diberikan: - SK PPID ttg Penolakan Permohonan Informasi - Pemberitahuan Tertulis dan Tanggapan berisi alasan permohonan ditolak (termasuk informasi dikecualikan)	Informasi Dikecualikan	23 April 2020	23 April 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
12	PST-1905 2020-059	19/05/2020	Herfan Rizaldi	Jl. GN JAYA WIJAYA No. 24 LK. IX, Binjai Estate, Binjai Selatan, Sumatera Utara	hervan.rinaldi@gmail.com	Pelaku Usaha	Data Tembusan Laporan Penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Asahan tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020	Untuk pengawasan masyarakat		v	-	-	-	-	v	Diberikan pemberitahuan tertulis dan tanggapan bahwa informasi tidak dimiliki/dikuasai BPOM	Tidak dikuasai	29 Mei2020	29 Mei2020	-	-
13	PST-0109 2020-001	1 September 2020	Anwar Rovik	Pulo Kidul, Rt 09/Rw 04, Pundungsari, Trucuk, Klaten 57467	rovic.anwar@gmail.com	Pelajar/Mahasiswa	Data kejadian/kasus keracunan makanan, kejadian/kasus keracunan makanan yang spesifik disebabkan oleh bakteri Bacillus cereus, (beserta penyebabnya, cemaran bakteri patogen pada makanan, khususnya Bacillus cereus) selama 5 tahun terakhir (2015-2020)	Sebagai acuan dalam merumuskan urgensi penelitian	v	v	-	v	-	-	v	Sesuai tanggapan, informasi diberikan sebagian yang di bawah penguasaan Badan POM yaitu data kejadian/kasus keracunan makanan dan minuman selama 5 tahun terakhir (2015 - Agustus 2020). Disarankan menghubungi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian	Informasi tidak dikuasai	7 September 2020	8 September 2020	Nihil	Nihil

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
																Kesehatan untuk informasi lebih lanjut.					

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
14	PST-0211 2020-016	2 November 2020	Andi Yohanes	Grand Duta Tangerang Blok D3 No. 46, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten; Email; 03:08:54	BIO.KUSUMA@YAHOO.CO.ID	Karyawan	Monografi Permethrin bahan baku dan dalam bentuk sediaan farmasi dari Buku Farmakpe Eropa 9 (European Pharmacopoeia 9)	Untuk registrasi produk Ke BPOM	v		-		v		v	Sesuai tanggapan, informasi tersebut hanya tersedia dalam bentuk buku/hard copy dan tidak diperkenankan untuk digandakan, namun dapat diakses langsung di Perpustakaan Badan POM dengan kode eksemplar B04915U, lokasi di Rak Buku 2.	-	2 November 2020	2 November 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
15	PST-1311 2020-102	13 November 2020	Ikhwan Subhani, S.H	Asrama Polres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjar Baru Selatan Kota Banjarbaru	satnarkobabjb@yahoo.com	Praktisi Hukum	Salinan SK BPOM No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar produk Trihexyphenidyl	Akan digunakan sebagai lampiran dalam berkas perkara tindak pidana kesehatan	v		-	v	-	-	v	Sesuai tanggapan, dokumen diberikan untuk dipergunakan sesuai tujuan penggunaan informasi. Selain itu disarankan untuk berkoordinasi dengan BBPOM d Banjarmasin untuk kelengkapan berkas perkara.	-	30 November 2020	30 November 2020	-	-

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
16	PST-3012 2020-013	29 Desember 2020	Muhammad Khairuman	Jl. Swadaya No. 30, RT 001/RW 004, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur	muhammad.khairuman@ensevial.com	Karyawan	Data Semua PBF yang sudah mendapat sertifikat CDOB dan nomor sertifikat CDOB beserta masa berlaku sertifikat CDOB	Sebagai data penunjang untuk melakukan kualifikasi pemasok/ supplier sehingga mendapatkan supply obat dari PBF resmi yang mempunyai sertifikat CDOB	v	-	-	v	-	-	v	Sesuai tanggapan, Data Pedagang Besar Farmasi di Indonesia (PBF) di Indonesia yang telah mendapatkan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan aktif beroperasi, nomor sertifikat CDOB beserta masa berlaku sertifikat CDOB data dimaksud dapat Saudara akses secara terbuka melalui website https://sertifikasicdob.pom.go.id pada menu Sertifikat CDOB.	-	30 Desember 2020	4 Januari 2020	-	-

LAMPIRAN 4

Laporan Singkat Layanan Informasi PPID BPOM Tahun 2020

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
Januari	2	9 Hari Kerja	0	1	1	0	0	2
Februari	4	11 Hari Kerja	3	1	0	0	1	0
Maret	2	7 Hari Kerja	1	0	1	0	0	1
Triwulan I	**8**	**9,5 Hari Kerja**	**4**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3**
April	3	9 Hari Kerja	1	0	2	2	0	0
Mei	1	7 Hari Kerja	0	0	1	0	0	1
Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
s/d Triwulan II	**12**	**9,17 Hari Kerja**	**5**	**2**	**5**	**2**	**1**	**4**
Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
September	1	6 HK	0	1	0	0	0	1
s/d Triwulan III	**13**	**8,92 Hari Kerja**	**5**	**3**	**5**	**2**	**1**	**5**
Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
November	2	6,5 Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Desember	1	3 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
s/d Triwulan IV	**16**	**8,25 Hari Kerja**	**8**	**3**	**5**	**2**	**1**	**5**

LAMPIRAN 5

REGISTER KEBERATAN

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran Permohonan Informasi Publik	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan* (Pasal 35 ayat 1 UU KIP)							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*

a penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

c tidak ditanggapinya permintaan informasi

d permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e tidak dipenuhinya permintaan informasi

f pengenaan biaya yang tidak wajar

g penyampaian informasi melebihi waktu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik